



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

### **PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PRESIDEN**

**NAMA : AHMAD HUSIN TAMBUNAN, S.STP, M.Si**  
**N I P : 19820719 200012 1 001**  
**N D H : 10**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**TAHUN 2019**

## EXECUTIVE SUMMARY

Pembangunan Sistem Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Pemerintahan Daerah secara Nasional kepada Presiden (IHP-PDN) merupakan operasionalisasi mandat kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejak reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, kewajiban penyampaian IHP-PDN tersebut belum pernah dilaporkan kepada Presiden.

Upaya bersama *stakeholder* untuk mewujudkan IHP-PDN telah dirancang dalam tahapan *milestone* dan khusus untuk *milestone* jangka pendek, telah seluruhnya tercapai atau dengan kata lain telah seluruhnya berhasil dilaksanakan, yaitu:

TAHAP UTAMA	CAPAIAN
Pembentukan Tim Pembangunan Sistem Pelaporan IHP PDN	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-101 Tahun 2019
Diskusi Pakar mengenai urgensi IHP-PDN	Diskusi Bersama Pakar Pemerintahan Daerah tanggal 12 April 2019
Diskusi untuk mendapatkan input dari stakeholder	Telah dilaksanakan diskusi bersama stakeholder utama a. Itjen K/L: 14 s.d 23 Mei 2019 b. Inspektorat Daerah di lima daerah yaitu Aceh, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan Kabupaten Maros.
Penyusunan Draft Permendagri IHP-PDN	Tersedia draft Permendagri Tata Kelola Pengawasan Pemda dengan salah satu bab pembahasan terkait IHP-PDN
Penyusunan desain model aplikasi IHP-PDN ( <i>prototype</i> uji petik di 3 lokasi)	Telah tersedia aplikasi <i>prototype</i> SIP yang memuat menu pelaporan IHP-PDN dengan alamat domain SIP (IP adres 27.111.41.171) telah dilakukan uji petik di lima daerah (Aceh, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan Kabupaten Maros)

Seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri dari internal Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian/Lembaga, Koalisi Masyarakat, Akademisi, dan Praktisi Pemerintahan telah mendukung proyek perubahan ini.

Tantangan terbesar dalam melakukan inovasi perubahan adalah mengkomunikasikan ide gagasan kepada *stakeholder* dan melakukan pengawalan secara terus menerus terhadap target yang telah ditetapkan.

Harapannya proyek perubahan IHP-PDN dapat memberikan nilai tambah kepada tatakelola pemerintahan daerah dan secara khusus peningkatan kapabilitas APIP.